

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Korea Selatan dapat bertahan dalam melewati krisis moneter Asia atau *Asian Financial Crisis* yang melanda hampir seluruh negara di Kawasan Asia. Korea Selatan, Thailand, dan juga Indonesia merupakan negara-negara yang mengalami dampak paling parah dari terjadinya krisis tersebut. Pemerintah Korea Selatan sampai harus meminjam dana bantuan dari IMF agar dapat keluar dari krisis tersebut.

Krisis Moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 melanda hampir semua negara di Asia, termasuk Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Selatan dapat terselamatkan dari krisis tersebut. Tentunya ada beberapa upaya yang melatar-belakangi kesuksesan Korea Selatan dalam melewati Krisis Moneter Asia tahun 1997 itu. Korea Selatan memiliki kekuatan dan juga kelemahan pasca krisis tersebut berlangsung. Krisis ini bermula di Thailand, jatuhnya nilai mata uang Baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.

Korea Selatan, Indonesia dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Rasio utang PDB asing naik dari 100% menjadi 167% di empat negara

ASEAN pada tahun 1993–1996, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang ekspor hanya dialami oleh Thailand dan Korea Selatan. Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai US\$40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, negara-negara yang terdampak parah dalam krisis ini.

Meski fundamental ekonomi makro Korea Selatan sangat baik, namun sektor perbankannya dibebani kredit macet luar biasa. Angka *No Performing Loan* (NPL) yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korea Selatan yang mengalami *default*, nilai sahamnya jatuh, atau bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang notabene merupakan produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa efek Seoul jatuh sebesar 4% pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga mencapai angka 7%, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi Korsel. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 November 1997, dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember tahun 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors (NST, 2016).

Pada tanggal 11 Oktober tahun 1996, Korea Selatan baru dikategorikan sebagai negara maju bidang ekonomi dengan menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Namun, satu tahun kemudian, krisis moneter yang melanda Korea Selatan memberikan dampak dahsyat bagi seluruh masyarakat Korea Selatan. Tanggal 23 Januari tahun 1997, 'Hanbo Iron&Steel' menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya sebesar 5 triliun 700

miliar won. Di dalam proses pinjaman dana yang besar itu, terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan. Kasus Grup Hanbo bukan hanya bangkrutnya sebuah perusahaan, tetapi juga menjadi awal yang mengguncang perekonomian nasional. Setelah itu, berbagai perusahaan besar juga turut menjadi bangkrut. Akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, maka dunia keuangan juga mengalami kesulitan, sampai tidak bisa membayar dana yang dipinjam dari luar negeri. Karenanya, cadangan devisa turun drastis, dan bank juga menghadapi krisis bangkrut. Selain itu, krisis ekonomi di Asia Timur membuat perekonomian Korea Selatan menjadi lebih sulit.

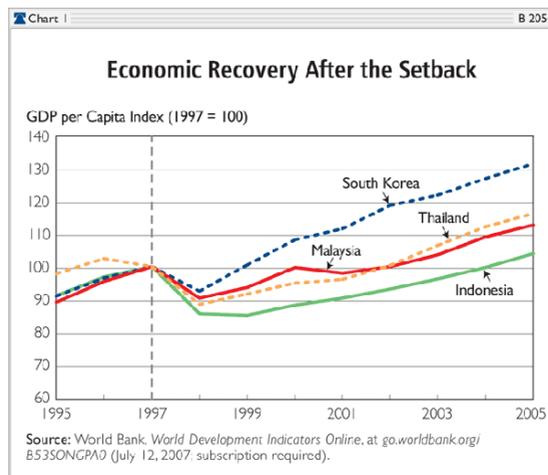
Akibat sinyal merah bagi ekonomi Korea Selatan, para investor asing yang kehilangan minat pada pasar Korea Selatan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga anjlok. Akhirnya, pada bulan November, agenda untuk meminta bantuan keuangan kepada IMF dibahas secara terbuka, dan Korea Selatan memasuki kerangka IMF mulai tanggal 3 Desember 1997 (KBS WORLD RADIO, 2015).

Selain Korea Selatan, terdapat negara-negara Asia Tenggara yang juga meminta bantuan dana dari IMF seperti Thailand dan Indonesia. Namun, Thailand membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat pulih kembali setelah krisis itu terjadi. Hal itu disebabkan oleh keadaan Thailand sebelum krisis, dimana pada saat itu Thailand sudah menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar. Pada tahun 1980-an perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbul lah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang.

Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok hingga 75% (Leightne, 2007).

Begitu juga dengan Indonesia yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih karena sebelum krisis terjadi, keadaan di Indonesia sedang kacau baik itu secara ekonomi ataupun politik. Dengan situasi dan kondisi yang kacau atau tidak mendukung, membuat perhatian Pemerintah Indonesia pada saat itu menjadi terpecah dan tidak bisa fokus kepada sektor perekonomian saja.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan setelah Krisis**



Sumber: World bank. *World Development Indicators Online*, at go.worldbank.org

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Korea Selatan setelah krisis yang menimpa kawasan Asia pada tahun 1997 terus mengalami peningkatan yang sangat

signifikan lebih dari negara-negara penerima bantuan dana IMF yang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

“Faktor-faktor apa yang membuat Korea Selatan mampu melewati krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan dapat pulih dengan cepat?”

## **C. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa “*Faktor-faktor apa yang membuat Korea Selatan mampu melewati krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan dapat pulih dengan cepat?*” adalah *Teori Developmental State* oleh Chalmers Johnson.

### **Teori Developmental State (oleh Chalmers Johnson)**

Teori *developmental state* atau teori pembangunan negara adalah teori yang membahas relasi antara negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut dengan prioritas pada aktivitas pembangunan. Dalam teori pembangunan negara, gagasan utama yang diusung berangkat dari pemikiran *state-led development* atau negara sebagai pemimpin pembangunan. Jadi, karena negara memegang peran kunci dalam pembangunan, implementasi dari teori ini menuntut adanya pemerintahan yang baik.

Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki. Cara-cara ini semata-mata dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional tertentu (Menocal, 2006).

Menurut Johnson teori pembangunan negara sama sekali tidak menolak investasi asing. Namun, dalam teori ini, investasi yang masuk harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendorong pembangunan serta harus dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Karenanya, proses pembangunan negara setidaknya harus memiliki dua atribut utama, yaitu negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengontrol kekuasaannya dan untuk mendesain serta menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan. Kemudian negara juga harus memiliki strategi yang mumpuni guna mencapai tujuan dan memiliki institusional, serta perspektif politik yang spesifik.

*Developmental State* tidak hanya menargetkan tujuan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri dengan memanfaatkan pasar dalam negeri saja. Perlu diingat bahwa peningkatan kondisi ekonomi yang ditargetkan dalam *developmental state* juga saling berhubungan dengan negara-negara lain, atau dalam tataran perdagangan internasional sebagai bentuk dari liberalisasi perdagangan. Karenanya, setiap negara yang mengimplementasikannya harus memilih strategi yang lebih luas dalam konteks regional dan berkeeseimbangan terhadap kekuasaan internasional.

Dalam kaitannya dengan perbedaan kebijakan Korea Selatan dalam menghadapi krisis moneter Asia tahun 1997 adalah Pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan cara menerapkan kebijakan hutang luar negeri yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menerima dana bantuan dari IMF dengan menaati sejumlah ketentuan dan persyaratan tertentu atau *structural adjustment programme*. *Structural adjustment programme* adalah proses pemberian dana bantuan atau pinjaman dari IMF kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan tertentu terlebih dahulu.

Memang keberhasilan itu bukanlah semata-mata karena krisis, melainkan juga karena beberapa faktor fundamental lainnya yang telah tumbuh dalam masyarakat Korea Selatan. Salah satu faktor pendukung yang pantas dicatat adalah bahwa tingkat pendidikan masyarakat Korea Selatan relatif tinggi. Begitu juga tingkat GNP perkapita mereka pada waktu krisis sudah mencapai US\$8000. Sehingga tingkat pendidikan dan kekayaan semacam itu dapat mendorong industri Korea Selatan kearah consensus yang konstruktif dan positif, bukan destruktif ataupun kontraproduktif (UGM, 2005).

## **D. Hipotesa**

Korea Selatan mampu melewati krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan dapat pulih dengan cepat karena dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal:

1. Faktor eksternal berupa kesepakatan dengan *International Monetary Found* (IMF).
2. Faktor internal berupa kebijakan dari pemerintah Korea Selatan dalam menangani krisis moneter di Asia tahun 1997.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil dari penelitian sebagai salah satu rujukan untuk melakukan riset
2. Menguraikan tentang bagaimana kondisi perekonomian Korea Selatan saat melewati Krisis Moneter Asia pada tahun 1997.
3. Menganalisis menggunakan teori Developmental State untuk menjabarkan tentang kondisi Korea Selatan saat melewati Krisis Moneter Asia tahun 1997.

## **F. Metodologi Penelitian**

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Adapun data yang di kumpulkan adalah melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari jurnal, dokumen-dokumen, website, buku-buku, dan berita baik dicetak maupun elektronik, yang satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi.

## **2. Teknik Analisis Data**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang penulis uraikan, maka penulis akan menggunakan model analisis dengan metode deduktif yang menggunakan teori pemikiran dari Chalmers Johson dalam kaitannya dengan kondisi Korea Selatan saat melewati krisis moneter Asia tahun 1997.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Adapun jangkauan penelitian pada penulisan ini diawali dari terjadinya Krisis Moneter tahun 1997. Di tahun inilah tepatnya, juni 1997 terjadilah krisis moneter yang mengakibatkan jatuhnya mata uang Bath. Hal ini lah yang mengakibatkan dampak terhadap negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, China dan negara Asia lainnya.

Tahun 2005 Korea Selatan sudah mampu menangani krisis moneter yang terjadi di negaranya dengan meninggalkan negara-negara Asia lainnya. Keberhasilan Korea Selatan dalam menangani krisis moneter negaranya dibuktikan dengan membayar hutang kepada IMF tiga tahun lebih cepat dari rencana pembayaran yang disepakati.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan, menjabarkan tentang keadaan di Korea Selatan saat melewati krisis moneter Asia Tahun 1997.

**BAB II** Penyebab dan Dampak, akan menjabarkan tentang apa saja penyebab terjadinya atau asal mula krisis moneter Tahun 1997 tersebut. Serta menjelaskan dengan detail dampak apa saja yang timbul akibat krisis tersebut, baik itu dampak ekonomi ataupun dampak politik, baik secara regional ataupun global.

**BAB III** Keadaan sebelum Krisis dan Sesudah Krisis, akan menjelaskan bagaimana keadaan Korea Selatan sebelum serta setelah krisis tersebut berlangsung. Menjelaskan tentang bagaimana Korea Selatan berinteraksi dengan krisis tersebut.

**BAB IV** Faktor-faktor yang mempengaruhi Korea Selatan, akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi Korea Selatan dalam melewati krisis moneter di Asia pada tahun 1997.

**BAB V** Kesimpulan, yang berupa penutup berisi tentang serangkaian penjelasan yang disertai jawaban yang mendukung hasil penelitian tersebut.